



ALUR KEPENGURUSAN DOKUMEN RENCANA KEGIATAN BONGKAR MUAT (RKBM) OLEH PT. KALIMANTAN MANDIRI SUKSES BANJARMASIN

Capt. Firdaus S¹, Mini S², Uni M^{✉3}

Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima

16/08/2021

Disetujui

19/08/2021

Dipublikasikan

05/09/2021

Keywords:

RKBM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alur pengurusan Dokumen Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, Pemuatan di mother vessel (MV) atau kapal induk menyangkut berbagai aspek tentang bagaimana cara melakukan persiapan dan pemuatan diatas kapal baik dalam hal persiapan logistik maupun persiapan dokumen rencana kegiatan bongkar muat yang diajukan ke kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) oleh PT. Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin selaku perusahaan bongkar muat. Namun dalam kenyataan aspek-aspek tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga akan berdampak kerugian pada perusahaan pelayaran dan pemilik muatan, usaha bongkar muat barang dari kapal ke kapal, yang merupakan terdiri dari kegiatan bongkar muat, pengaturan muatan dan penerimaan/pengiriman.

Abstract

This study aims to describe the Flow of Unloading and Loading Activity Plan Documents (RKBM). This research is a type of descriptive qualitative research, namely as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Thus, loading on the mother vessel (MV) involves various aspects of how to prepare and load on the ship, both in terms of logistics preparation and preparation of loading and unloading activity plan documents that are submitted to the port office and port authority (KSOP) by PT. . Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin as a loading and unloading company. However, in reality these aspects have not been implemented properly, so it will have an impact on shipping companies and cargo owners, the business of loading and unloading goods from ship to ship, which consists of loading and unloading activities, cargo arrangement and receiving/shipping.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu penghasil tambang batubara di dunia. Salah satu daerah penghasil tambang di Indonesia adalah Kalimantan. Peranan pelayaran sungguh penting bagi kehidupan dan memiliki peran penting dalam bidang pengangkutan, pengangkutan laut memegang peran penting sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen. Sehingga hasil tambang di Indonesia ini dijadikan komoditi ekspor berbagai negara di dunia dan juga berperan penting sebagai modal dan pembangunan bangsa Indonesia. Untuk mengangkut hasil tambang tersebut sarana sektor perhubungan laut menjadi vital dan dominan dalam menunjang kelancaran pengangkutan batu bara tersebut.

Mengingat keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dimana luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratannya, maka sarana pengangkutan melalui laut besar peranannya dalam menghubungkan kota-kota maupun pulau-pulau yang ada di tanah air. Selaras dengan peranan pengangkutan sebagai alat transportasi yang mengangkut barang dari pulau satu ke pulau yang lain melalui laut, maka pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi laut oleh MPR RI telah digariskan sebagai berikut :

“Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan Indonesia Timur, dengan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. Laut nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pengutamaan pelayaran nusantara nasional yang mampu menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak dan aman sekaligus menciptakan lapangan kerja.” (Ketetapan MPR RI NO. II/MPR /1993 tentang GBHN,1993)

Sesuai dengan amanat garis besar haluan negara diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi laut antara lain diarahkan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar pulau (*inter insuler*), disamping perdagangan antar negara (impor-ekspor). Adanya peningkatan arus barang dan jasa melalui kegiatan perdagangan melalui laut tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa yang memiliki keterkaitan, kaitannya dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan Bongkar Muat (PBM) memiliki peranan yang sangat besar.

Mengingat kegiatan usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM) meliputi kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke kapal pengangkut, maka pada prinsipnya kegiatan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut. Usaha bongkar muat yang dilakukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) merupakan kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, dalam hal ini pembongkaran barang atau batu bara dari kapal tug boat ke kapal mother vessel (MV) atau kapal induk.

Pemuatan di mother vessel (MV) atau kapal induk menyangkut berbagai aspek tentang bagaimana cara melakukan persiapan dan pemuatan diatas kapal baik dalam hal persiapan logistik maupun persiapan dokumen rencana kegiatan bongkar muat yang diajukan ke kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) oleh PT. Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin selaku perusahaan bongkar muat. Namun dalam kenyataan aspek-aspek tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga akan berdampak kerugian pada perusahaan pelayaran dan pemilik muatan, usaha bongkar muat barang dari kapal ke kapal, yang merupakan terdiri dari kegiatan bongkar muat, pengaturan muatan dan penerimaan/pengiriman. Adapun rumusan masalah artikel ini adalah Bagaimana Alur Pengurusan Dokumen Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2014:4). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan diksi yang digunakan pada pelayanan penjualan tiket online pada PT. Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin Cabang Banjarmasin.

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek tempat data diperoleh. Menurut Muhammad (2014:167) sumber data penelitian ini mengenai siapa, apa, darimana informasi terkait fokus penelitian diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah web PT. Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin Cabang Banjarmasin.. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Adapun Metode Pengumpulan Data melalui Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tidak langsung yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan pihak PT. Kalimantan Mandiri sukses Banjarmasin, dan Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data dengan Mempelajari arsip dokumen-dokumen yang menyangkut permasalahan yang dapat membantu sebagai jawaban dalam permasalahan, melakukan hasil pengumpulan data melalui permasalahan, dan menyiapkan buku sebagai bahan penelitian dan mencari sumber dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu solusi terhadap permasalahan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 152 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang, maka setiap Pengurusan Rencana Kegiatan Bongkar Muat , harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dengan prosedur, sebagai berikut:

1. PT. Kalimantan Sukses Mandiri Banjarmasin mengajukan formulir permohonan sebanyak 5 lembar yang berisi data kapal yang akan melakukan bongkar muat ke PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT)

2. Setelah Formulir Permohonan distempel, pihak PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) mengembalikan 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan yaitu lembar (Putih, Kuning, Merah).
 - a. Lembar Putih untuk *Shipping Agent/Stevedoring*.
 - b. Lembar Merah untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin.
 - c. Lembar Kuning untuk PT. Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin yang dijadikan arsip.
3. Setelah itu lembaran merah dijadikan lampiran untuk Proses Pengurusan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM), yang diajukan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bagian Lalu Lintas Kapal (LALA). Selain itu juga dilampirkan beberapa dokumen, yaitu sebagai berikut:
 - a. Formulir Permohonan *Vessel dan Cargo Service*

Pada formulir permohonan *vessel dan cargo service* pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM), harus mengisi data kapal yang akan sandar dan melakukan kegiatan pemuatan batubara adapun isi dari formulir permohonan tersebut yaitu berisikan nama kapal, IMO/MMSINUM, *Call Sign* (nama panggilan), *Fligh* (bendera), *Agen* (nama agen), DWT (bobot mati), GT (berat kotor), LOA(panjang), tanggal dan jam datang kapal, serta jumlah muatan batubara ayang dimuat.
 - b. Surat Penunjukan/*Shipping Instruction* (SI)

Pada surat ini berisikan perintah atau penunjukan dari pengirim kepada carrier untuk mengangkut barang seperti yang tercantum di dalam Surat Penunjukan/*Shipping Instruction* (SI) yang berfungsi sebagai bukti pemesanan ruang muat kapal. Dan surat ini juga menjadi bukti bagi perusahaan bongkar muat yang akan melakukan pengurusan Rencana Kegiatan Bongkar Muat(RKBM).
 - c. Laporan Rencana Kegiatan Bongkar Muat(RKBM)

Pada laporan ini perusahaan bongkar muat akan melaporkan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat, mulai dari tanggal kapal datang dan juga rencana bongkar muat.

Pada laporan ini , perusahaan bongkar muat juga harus mengisi data kapal yang akan muat, dan berapa banyak jumlah barang yang akan dimuat pada kapal tersebut.
 - d. *Invoice*

Invoice akan terbit ketika perusahaan bongkar muat sudah melakukan pembayaran tariff yang dikenakan pada banyaknya *cargo loadet*.
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Perintah Kerja (SPK) diperoleh dari Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yang berisikan daftar anggota atau buruh yang akan membantu melakukan kegiatan bongkar muat di kapal *Vessel*. Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan surat penunjukan resmi bagi buruh yang akan melakukan bongkar muat di kapal, yang sudah mendapatkan ijin.
 - f. Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

PKKA merupakan suatu syarat berupa surat yang didapat dari sistem yang telah dibuat oleh departemen perhubungan. Surat ini berguna ketika pihak

shipping agency baik itu *General Agent* (GA) maupun *Local Agent* (LA) bertugas menangani kapal asing di pelabuhan Indonesia, atau ditunjuk pemilik kapal untuk menjalankan tugas.

g. *Stowage Plan*

Lampiran *Stowage Plan* diperoleh dari kapal *Vessel* yang melakukan bongkar muat yang berisikan gambaran setiap palkah dan muatan yang ditentukan.

h. *Draft Survey*

Pada *draft survey* berisikan survey mengenai kapal *vessel* yang sebelumnya sudah di *survey* oleh *surveyor*. *Draft survey* ini juga memperlihatkan perhitungan muatan atau berat barang yang dapat dimuat atau dibongkar oleh kapal *vessel*.

i. *Time Sheet*

Time sheet berisikan *daily record* jadwal pemuatan dari awal kapal muat sampai kapal *complete*.

j. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) merupakan surat izin yang nantinya diberikan kepada perusahaan pelayaran.

k. Surat Pernyataan Atau Surat Perjanjian Bongkar Muat

Surat pernyataan atau surat perjanjian bongkar muat adalah surat yang berisikan perjanjian yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh pihak perusahaan bongkar muat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bongkar muat.

Berisikan aturan-aturan yang telah dibuat berdasarkan surat ijin perusahaan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setempat.

4. Setelah dokumen diproses, bagian Lalu Lintas Kapal (LALA) memberikan Nota Tagih Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Angkutan Laut dan Nota Tagih Jasa Barang.
5. Selanjutnya Pihak PT.Kalimantan Mandiri Sukses Membayar Nota Tagih Ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), setelah dibayar maka Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) Memberikan Kwitansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut: Proses Pengurusan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) pada PT. Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin, yaitu pihak perusahaan bongkar muat atau PT. Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin mengajukan data kapal ke PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT), kemudian pihak PT. Kalimantan Mandiri Sukses Banjarmasin melakukan pembayaran, selanjutnya pihak PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) akan memberikan stempel pada data kapal, dan pihak perusahaan akan melampirkan data kapal

tersebut pada dokumen Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM). Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) yang akan diajukan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bagian Lalu Lintas Kapal (LALA). Setelah nota tagih diterbitkan akan diajukan ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan akan diproses setelah perusahaan melakukan pembayaran untuk menerbitkan tanda bukti pelunasan yaitu kwitansi.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, L., 2014. *Metologi Penelitian , Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muhammad, 2014. *Metodologi Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Nomor 152 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang, maka setiap Pengurusan Rencana Kegiatan Bongkar Muat

Aguw Randy Y.C . 2013. *Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran* Ditinjau dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 tentang Jurnal Hukum.

Bogdan, Robert C. Dan Biklen Kopp Sari, 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc: Boston London.

Engkos, Kokasih dan Hananto, Soewedo. 2007. *Manajemen Perusahaan Pelayaran*.

MPR. 1993. Ketetapan MPR RI NO. II/MPR /1993 tentang GBHN